

# **FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT PADA KEBIJAKAN MILITER BARU DIJEPANG TAHUN 2015**

Oleh: HALMY DZAKWAN TARMIZI

Pembimbing: Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si

Prodi Ilmu Hubungan Internasional

[hdtarmizi@gmail.com](mailto:hdtarmizi@gmail.com)

## **ABSTRAK**

## **ABSTRAK**

This writing explains the factors driving the United States' support for the new military law in Japan. as Japan had known after World War II was under the United States in terms of security and influenced constitutional changes in Japan known as Article 9 of the Japanese Constitution. this made Japan implement a passive military system. Japan is not allowed to use weapons and the military in resolving international issues. In 2015, Japan revised article 9 of the Japanese constitution. which means that the role of the Japanese military, called the SDF, is becoming more proactive and Japan can send peacekeeping forces abroad. this is supported by the United States which has been the umbrella of Japanese security since the end of World War II. This study aims to identify the reasons for the United States in supporting changes in new military policies in Japan. in changing policies that have persisted for years and become a new Japanese state.

***Keywords:** Article 9 of the Japanese Constitution, alliance, United States, Japan, military alliance, Defense and Security Policy.*

### **A. Pendahuluan**

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, Jepang sebagai pihak yang kalah perang dipaksa menandatangani perjanjian yang berisi bahwa Jepang untuk sementara waktu berada dibawah kontrol Amerika Serikat dan menjalankan Deklarasi Postdam yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, Inggris dan Cina. Dimana Jepang harus tunduk pada pemerintahan sekutu. Perjanjian tersebut berdampak pada campur tangan Amerika Serikat untuk kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Dan mempengaruhi perubahan

konstitusi undang-undang dasar Jepang tahun 1947. Dalam perubahan tersebut akhirnya membawa prinsip-prinsip baru dalam konstitusi Jepang, diantaranya prinsip kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia dan penolakan perang. Salah satu perubahan konstitusi pada pasal 9 sebagai berikut : “Bercita-cita tulus menciptakan perdamaian Internasional yang dilandasi hukum dan ketertiban. Rakyat Jepang selamanya tidak mengakui perang untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Untuk melengkapi paragraf sebelumnya, kekuatan militer di darat, laut dan udara serta aspek kekuatan militer potensial lainnya tidak akan di pertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui” (Faisol, 2015).

Di bawah konstitusi 1947, Jepang oleh Amerika Serikat dipaksa menerapkan sistem militer yang bersifat pasif. Jepang tidak diperkenankan lagi menggunakan militer sebagai instrumen untuk menyelesaikan setiap isu internasional dan memulai suatu pola yang secara jelas membagi ekonomi dan politik (Despuriansyah, 2015). Dengan kata lain, negara ini tidak diperkenankan memiliki angkatan bersenjata dengan kemampuan menyerang negara lain. Jepang hanya menekankan pada kebijakan Ekonomi dan sangat mendukung adanya perdamaian dunia sehingga bersifat anti perang. Hal tersebut terlihat dari peran militer Jepang yang hanya bersifat sebagai tentara bela diri atau Self Defense Force (SDF). (Toriq, 2015)

Selama Perang Dingin berlangsung, Amerika Serikat berupaya membendung kekuatan komunis Uni Soviet. Salah satu upaya yang dilakukan Amerika Serikat adalah dengan membentuk aliansi sebanyak banyaknya. Hal tersebut yang mendorong Amerika Serikat untuk menjadikan Jepang sebagai salah satu aliansi nya untuk membantu Amerika Serikat menangkal kekuatan Uni Soviet. Pada awal pembentukan aliansi Amerika Serikat dan Jepang, sebanyak 50.000 anggota angkatan perang AS ditempatkan di Jepang, yang terdiri dari 2.600 personil Angkatan Darat, 21.000 Marinir dan 230 pesawat tempur Angkatan Udara ditempatkan pada pangkalan militer di Okinawa (Despuriansyah, 2015)

Jepang melakukan transformasi dalam kebijakan pertahanan dan luar negerinya dengan melakukan perubahan penafsiran terhadap pasal 9 berupa pembelaan diri secara kolektif (*Collective Self Defense*) yang dapat diartikan salah satunya bahwa Jepang diperbolehkan ikut menggunakan kekuatannya ketika negara sekutunya terancam

oleh serangan dari negara lain. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan apa yang ada dalam pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 1946 tentang penolakan terhadap perang. Dimana pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 1946, berisi tentang hak untuk membela diri (self defense) dari ancaman atau serangan yang terjadi terhadap negara Jepang saja (Faisol, 2015).

Pada tahun 2015 Parlemen Jepang yang didominasi oleh Partai LDP dan Partai Komeito di Majelis tinggi, meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Baru Jepang dengan memperoleh 148 suara pendukung dan 90 suara penentang. Dengan adanya RUU baru tersebut, Jepang dengan lebih leluasa mengirimkan tentara militernya ke luar negeri, dan mengikut sertakan SDF dalam kerjasama kolektif sehingga dapat membantu dan membela aliansi nya ketika menghadapi serangan. Serta SDF memiliki peran yang lebih aktif lagi dalam mengikuti misi perdamaian dibawah naungan bendera PBB dan peran SDF tidak lagi dibatasi oleh geografis.

Berbagai perubahan kebijakan pertahanan dan militer yang dilakukan oleh Jepang tersebut tidak lepas juga dari persetujuan dari pihak Amerika Serikat. Dimana pada perjanjian setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang dituntut untuk mengikuti perjanjian postdam yang berpengaruh terhadap seluruh kebijakan pertahanan Jepang berada dibawah kekuasaan Amerika Serikat (Despuriansyah, 2015). Amerika Serikat memaksa Jepang untuk menerapkan sistem pertahanan yang bersifat pasif dan dilarang menggunakan instrumen militer dalam menyelesaikan konflik internasional. Akan tetapi beberapa tahun terakhir justru Amerika Serikat selalu menyetujui usulan perubahan kebijakan pertahanan dan militer yang dilakukan oleh Jepang. Dimana pada tahun 2015 Jepang menjadi lebih proaktif dan hal ini didukung oleh pemerintah Amerika Serikat lewat Juru Bicara Kementerian Luar Negerinya yakni Katina Adams. Yang menyampaikan bahwa AS sangat memuji dan mendukung kebijakan Parlemen Jepang yang mengesahkan undang-undang (UU) Militer terbarunya.

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan Amerika Serikat dalam mendukung adanya perubahan kebijakan militer baru di Jepang. dalam mengubah kebijakan yang telah bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi Negara Jepang yang baru.

## **B. Literature Review**

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas maka penulis menggunakan teori pengambilan kebijakan luar negeri yang dipopulerkan oleh William D. Coplin, serta konsep Kepentingan Nasional untuk menggambarkan alasan mengapa Amerika Serikat mendukung adanya kebijakan militer baru di Jepang.

### **1. Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri**

Menurut William D. Coplin dalam bukunya mengatakan “dalam menganalisa mengapa sebuah negara menentukan sikap atau mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri, maka kita juga harus mempertanyakan mengapa para pemimpin dari negara itu membuat keputusan tersebut. Akan salah besar ketika kita beranggapan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan/keputusan luar negeri para pemimpin tidak memiliki bahan pertimbangan atau bertindak sembarangan. Melainkan sebaliknya, tindakan yang pada akhirnya diambil oleh para pembuat kebijakan itu merupakan akumulasi dari berbagai konsiderasi yang mempengaruhi mereka.” (Coplin & Marbun, 2003)

Seperti yang telah disebutkan diatas, William D. Coplin menyatakan bahwa para pembuat keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan politik luar negeri, sangat mempertimbangkan berbagai konsiderasi atau faktor yang ada. William D. Coplin menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri. Ketiga faktor itu yakni Kondisi Politik Dalam Negeri, Kemampuan/Situasi Ekonomi dan Militer, serta Konteks Internasional.

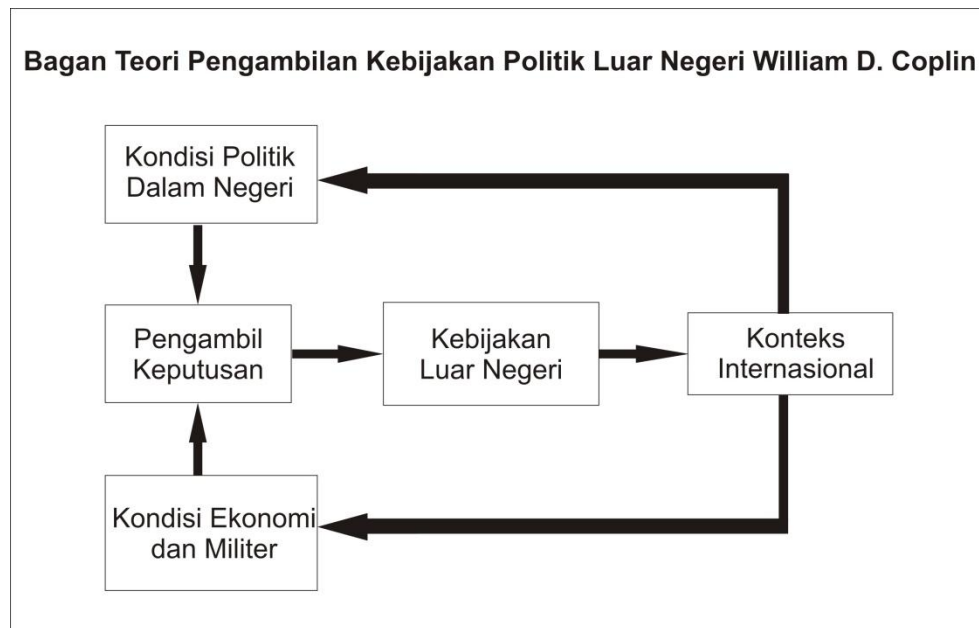
- a. Politik Dalam Negeri atau *Domestic Politics* merupakan kondisi yang telah atau tengah berlangsung didalam sebuah negara yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh para pembuat kebijakan dalam merumuskan tindakan politik luar negerinya. Seperti sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Selain itu, dari sisi kebudayaan yang berlaku dimasyarakat luas juga dapat dikaitkan dengan politik dalam negeri termasuk juga yang dianut oleh pengambil keputusan sehingga pada akhirnya akan

memberikan corak dan pengaruh bagi kebijakan politik luar negeri (Coplin & Marbun, 2003).

- b. Kondisi Ekonomi dan Militer terkadang juga disebut sebagai potensi atau kekuatan yang ada dalam sebuah negara dan dilihat sebagai faktor penting sebuah negara dalam memutuskan tindakan politik luar negerinya. Faktor ini menjadi sangat penting karena dalam membuat suatu kebijakan, suatu negara harus mampu dan sangat perlu menciptakan kondisi yang kondusif sebagai penopang politik luar negerinya baik dari perspektif ekonomi maupun keamanan atau militernya. Termasuk juga dalam hal ini adalah faktor geografis suatu negara (Coplin & Marbun, 2003).
- c. Konteks Internasional (*International Context*) merupakan situasi politik maupun situasi-situasi lain yang terjadi di luar negeri yang dapat mempengaruhi kondisi didalam negara tersebut sehingga diperlukannya pengambilan sikap luar negeri oleh negara itu sendiri. Termasuk juga dalam hal ini adalah hukum internasional serta dukungan maupun pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dan dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap sikap dan masalah yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Konteks Internasional ini merupakan situasi yang harus dihadapi ataupun dicegah dan sebisa mungkin diantisipasi oleh sebuah negara dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang (Coplin & Marbun, 2003).

Dalam memudahkan membaca dan memahami tentang teori ini, William D. Coplin dalam bukunya telah membuat sebuah bagan atau skema penyederhanaan untuk pemahaman terhadap teorinya. Adapun skema tersebut adalah sebagai berikut (Coplin & Marbun, 2003) :

**Bagan 1.1 Skema Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D. Coplin**



Berdasarkan bagan diatas, dapat dikatakan bahwa politik atau kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sebuah keputusan yang didapatkan melalui beberapa proses yang saling menghubungkan antar faktor yang ada. Kebijakan luar negeri merupakan sesuatu yang didahului dengan adanya tuntutan dan dorongan dari politik dalam negeri suatu negara. Disamping itu, faktor dibidang ekonomi dan militer juga menjadi pertimbangan kekuatan atau kemampuan sebuah negara dalam menghadapi sebuah isu. Kedua faktor ini kemudian akan masuk dan menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor yang berwenang .

Selain dua faktor ini, konteks internasional juga memberi pengaruh cukup kuat terhadap tuntutan maupun dukungan kepada aktor-aktor pengambil kebijakan didalam sebuah negara itu sendiri. Selanjutnya, beberapa faktor dan pertimbangan tadi diproses dan dianalisis oleh para pembuat kebijakan dan menghasilkan sebuah

kebijakan luar negeri. Melihat lebih jauh kepada alur bagan diatas, maka kebijakan luar negeri disini bisa diartikan sebagai sebuah hasil yang terpengaruhi oleh konteks internasional maupun sebuah hasil untuk merespon dan/atau untuk mengantisipasi situasi yang telah, sedang maupun berpotensi akan terjadi di dunia internasional itu sendiri (Coplin & Marbun, 2003).

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Tokoh yang menjelaskan konsep kepentingan nasional pertama kali yaitu Hans Morgenthau dengan pendekatan realisnya. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional. (Jasmine, 2013)

Definisi yang mengacu pada *national interest* sangatlah luas. Banyak tokoh-tokoh yang mendefinisikan kepentingan nasional dengan banyak ragam. Menurut Felix E. Oppenheim (1987) konsep kepentingan nasional adalah tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional -seperti menjaga otonomi politik dan integritas teritorial- kepentingan nasional secara praktik disinonimkan dengan *national security*. Di lain hal, Griffiths dan O'Callaghan (2002) menyertakan dua aspek yang berkaitan dalam kepentingan nasional. Yang pertama anggapan bahwa national interest diakui sebagai kebutuhan negara. Yang kedua, national interest digunakan sebagai dukungan dalam memberikan kebijakan. (Lucyana, 2014)

Menurut Jack C. Plano, Konsep kepentingan merupakan tujuan fundamental dan determinan yang paling menentukan yang memandu para pengambil keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik luar negeri sehingga kepentingan nasional suatu negara biasanya konsep yang digeneralisasi dari elemen-elemen yang membentuk kebutuhan-kebutuhan vital suatu negara. Kepentingan nasional biasanya sangat berkaitan dengan politik luar negeri suatu negara. Dalam menentukan kebijakan politik luar negerinya suatu negara sering menekankan konsep kepentingan nasional didalamnya (Satrio, 2011).

Kepentingan nasional memiliki tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Karena didalamnya mencakup juga beberapa unsur seperti kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, kesejahteraan ekonomi, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara (Plano & Olton, 1969).

Oleh karena itu, biasanya suatu negara dalam membuat suatu kebijakan politik luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh satu kepentingan saja yang mendominasi fungsi pembuatan kebijakan luar negeri suatu pemerintahan. Namun, mereka yang dipilih sebagai calon objek kekuasaan orang lain adalah mereka yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekuasaan atas orang lain. pada dasarnya pelaku di kancah politik pada saat yang bersamaan telah menjadi calon majikan dan calon subjek. Selagi ia berusaha memperoleh kekuasaan atas orang lain, orang lain berusaha memperoleh kekuasaan atas dirinya.

Disini Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kepentingan untuk memperkuat hegemoni globalnya di kawasan Asia Pasifik berusaha memanfaatkan Jepang sebagai alat untuk memudahkan Amerika Serikat menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Jepang yang tengah berusaha bersaing dengan China dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan berusaha membangun kembali militernya guna memperkuat sektor keamanannya. Ditambah lagi dengan ancaman Nuklir korea utara yang dapat mengancam negara Jepang dan Amerika Serikat. Hal ini justru dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dengan menjadikan Jepang sebagai sekutu mereka, dan siap membantu Jepang dalam perubahan militer baru di Jepang.

Dengan menjadikan Jepang sebagai sekutunya, Amerika Serikat dapat menggunakan Jepang sebagai pertahanan terluar atau pertahanan pertama yang dapat menangkal ancaman dari Korea Utara, dimana baru-baru ini Korea Utara telah meluncurkan uji coba rudal jarak jauh melintasi wilayah perairan Jepang dan diklaim dapat menjangkau wilayah Amerika Serikat (Sabur, Allen, Henderson, & Graham, 2017).



### C. Peran Ideologi yang Dianut Oleh Pemimpin Amerika Serikat Dalam Menentukan Kebijakan Luar Negeri

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi Politik Dalam Negeri sebuah Negara. Menurut William D. Coplin (2003) dalam sebuah buku yang berjudul “Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis”, setiap pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara dan juga kebudayaan dan ideologi yang berlaku dimasyarakat luas termasuk juga yang dianut oleh pengambil keputusan, dalam kasus ini ideologi partai Presiden yang sedang memimpin juga sangat mempengaruhi kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam menentukan sebuah kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat lebih didominasi oleh Presiden dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat daripada suara Kongres AS. Sebagai contoh pada saat membicarakan sebuah isu internasional terjadi beda pendapat antara pihak pemerintah dan parlemen, yang pada akhirnya Kebijakan Luar Negeri yang diambil adalah seperti yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri. Hal tersebut terlihat saat pengambilan kebijakan Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 yang diambil keputusannya oleh Presiden Bush meskipun suara di kongres lebih dominan untuk tidak menyetujui kebijakan tersebut (Despuriansyah, 2015)

Dalam pemerintahan Amerika Serikat, terdapat dua partai besar yang mempengaruhi Kebijakan Amerika Serikat. Terdapat perbedaan ciri khas *foreign policy* yang diambil antara Partai Republik dan Partai Demokrat pada saat berkuasa di Pemerintahan. Partai Republik menggunakan Ideologi Konservatif yakni tidak menekankan pada perubahan dan cenderung *status quo* dengan pemerintahan yang telah berjalan. Menurut Partai Republik, Negara dapat menggunakan kekuatan militernya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Partai Republik lebih menganut paham Realisme sehingga sering menggunakan pendekatan pada *hard power* dalam kebijakan Luar Negeri yang diambil. Sedangkan Partai Demokrat lebih menekankan pada pendekatan yang lebih *soft power*, dan paham yang dianut oleh Partai Demokrat adalah Liberalisme. Ciri khas penganut paham Liberalisme adalah mengedepankan *soft diplomacy*, dimana Partai Demokrat tidak dengan mudah menggunakan instrumen militer dalam menyelesaikan konflik atau isu internasional. Partai Demokrat lebih melihat *cost-benefit* yang dihasilkan dalam setiap Kebijakan Luar Negeri yang akan diambil oleh Amerika Serikat (Beck & Sorauff, 1992).

Paham yang dianut oleh Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Obama yakni paham Liberalisme, Obama merupakan salah satu kader Partai Demokrat yang menganut paham tersebut. Liberalisme menjadi identitas bagi Amerika Serikat di era kepemimpinan Barack Obama dan disebut sebagai negara *liberal internationalist*. Identitas inilah yang menjadi dasar dari kebijakan dan respon Amerika Serikat terhadap dinamika global. ciri-ciri dari negara *liberal internationalist* adalah dimana negara tersebut sangat mendukung adanya perdagangan bebas, institusi internasional, kerjasama keamanan, *collective problem solving* dan mengikuti hukum yang berlaku.

Perubahan fokus kebijakan yang dilakukan oleh AS dari Timur Tengah menuju ke Asia atau yang disebut dengan *Pivot to Asia*, merupakan hal yang paling membuat Amerika Serikat terlihat sebagai negara *Liberal Internationalism*. “*pivot*” atau bisa diartikan sebagai “*rebalance*” di kawasan Indo-Pasifik merupakan salah satu dari kebijakan luar negeri di era pemerintahan Obama yang paling menonjol. Sebagai negara yang liberal internasionalist, Amerika Serikat ingin melakukan kerjasama keamanan bersama Jepang sehingga akan menciptakan *collective problem solving* dan situasi yang stabil. Agar kepentingan Amerika Serikat dikawasan Asia Pasifik menjadi terlindungi. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam dukungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap reinterpretasi pasal 9 agar dapat memperkuat aliansinya dengan Jepang. Sehingga dengan semakin kuatnya hubungan aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang, maka akan semakin memperkuat keamanan kawasan dan menjadikan perdagangan bebas lebih maju lagi. Selain itu, dengan diperkuatnya hubungan aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang merupakan salah satu bentuk *collektiv problem solving*, terhadap permasalahan dalam mengimbangi kekuatan China dikawasan dengan bekerjasama secara kolektif dengan negara-negara Asia Pasifik. (Putri, 2018)

Isu-isu yang berkembang di dunia Internasional juga menjadi pengaruh bagi Kondisi Politik Dalam Negeri. Kepentingan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia mendorong Amerika Serikat untuk melakukan berbagai macam cara untuk mengimbangi kekuatan militer apapun yang tumbuh di kawasan Asia yang dapat mengancam kepentingan Amerika Serikat. Seperti munculnya kekuatan baru militer Tiongkok yang telah memperkuat kekuatannya serta Korea Utara yang terus mengembangkan nuklirnya. Akibat Faktor Eksternal inilah yang membuat Amerika

Serikat mendukung Jepang dalam melakukan revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang pada tahun 2015.

Kepentingan Amerika Serikat disini, dengan dilakukannya revisi terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang agar Peran SDF Jepang dapat bergerak dengan lebih aktif lagi di dalam kegiatan militer. Dengan perubahan yang terjadi di dalam militer Jepang membuat pihak Amerika Serikat juga diuntungkan karena Jepang dapat menjadi *extended deterrence* bagi Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. Dengan adanya Pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 2015 juga mengubah peranan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara yang tertuang dalam Japan-US Defense Guidelines 2015, dimana kerjasama keamanan ini tidak lagi bersifat asimetris dimana pada Japan-US Defense Guidelines 1978 dan 1997, peranan militer Jepang atau SDF bersifat lebih pasif dan sangat mengandalkan tindakan militer Amerika Serikat jika terjadi suatu ancaman atau serangan yang ditujukan kepada Jepang. Dengan direvisinya Pasal 9 Konstitusi Jepang membuat Jepang lebih aktif lagi dalam bertanggung jawab mengenai keamanan negaranya. Jepang juga diijinkan untuk mengambil tindakan intervensi militer untuk membantu sebuah Negara yang diserang oleh Negara lain. Sehingga hal ini sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat karena jika terjadi serangan terhadap Amerika Serikat maka Jepang dapat membantu secara militer dan membuat Amerika Serikat memiliki Pertahanan yang sangat kuat dengan Jepang sebagai aliansi nya (Putri, 2018, p. 191).

Kemudian keuntungan lainnya yang didapatkan oleh Amerika Serikat dengan dijadikannya Jepang sebagai *extended deterrence* dikawasan Asia Pasifik, akan membuat situasi politik dan keamanan dikawasan tersebut lebih kondusif. Sehingga aktifitas perdagangan yang sering dilakukan oleh Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik menjadi lebih aman. Salah satu kebijakan dalam negeri Amerika Serikat dalam masa kepemimpinan Obama adalah lebih menekankan fokus terhadap kegiatan perekonomian seperti perdagangan bebas. Fokus Amerika Serikat terhadap perdagangan bebas dapat dilihat dari *Trans Pasifik Partnership* (TPP) yang diprakarsai oleh Amerika Serikat sebagai media perdagangan Amerika Serikat dan negara-negara Asia Pasifik. TPP merupakan pusat dari strategi pivot to Asia yang dicanangkan oleh Presiden Barack Obamad dan TPP ditetapkan untuk menjadi kesepakatan perdagangan bebas terbesar didunia, yang mencakup 40 persen dari ekonomi global (McBride & Chatzky, 2019).

Amerika Serikat melihat peluang TPP bukan hanya membentuk hubungan antar anggota TPP, akan tetapi Amerika Serikat juga melihat adanya peluang di wilayah Asia Pasifik yang merupakan pasar yang besar dan berpotensi. Sehingga kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik untuk membentuk negara-negara di wilayah Asia Pasifik sebagai mitra utama Amerika Serikat. Presiden Barack Obama menegaskan jika Amerika Serikat akan meningkatkan keterlibatannya di Asia Pasifik dengan bergabung sebagai anggota TPP. Dengan adanya kerjasama dengan Jepang untuk menjaga keamanan dan kestabilan kawasan di Asia Pasifik, maka akan turut mengamankan aktivitas perdagangan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (Putri, 2018).

#### **D. Meningkatnya Peran Militer Jepang Dapat Menambah Kekuatan Militer Amerika Serikat**

Kerjasama militer di bidang pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang semakin kuat. Jepang bisa menjadi salah satu negara pendukung yang sangat penting bagi Amerika Serikat dalam menjalankan misi perdamaian di PBB. Meskipun adanya Undang Undang Pasal 9 Konstitusi yang mengatur tentang tidak diperkenankannya Jepang untuk menggunakan militer sebagai instrumen untuk menyelesaikan setiap isu internasional, namun dalam perjanjian kerjasama antara kedua negara tersebut Jepang berniat untuk selalu membantu Amerika Serikat dalam bidang Pertahanan dan keamanan. Dengan di revisinya pasal 9 Konstitusi Jepang, beberapa peran Jepang yang akan meningkat dan dapat menambah kekuatan militer Amerika Serikat dalam menjalankan berbagai misi perdamaian di dunia. Berikut adalah beberapa peran Jepang yang ikut membantu misi perdamaian militer Amerika Serikat :

##### **1. Jepang dapat menjadi penyokong kekuatan militer Amerika Serikat**

Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Yasuhiro Nakasone pada tahun 1983, yang menyatakan bahwa Jepang berjanji akan menjadi “kapal induk yang tidak dapat tenggelam di pasifik” untuk membantu Amerika Serikat dalam mempertahankan diri dari ancaman pembom Soviet. Dalam pernyataannya tersebut terlihat Jepang tidak akan segan untuk membantu Amerika Serikat saat dibutuhkan, dan Jepang mulai menjadi negara yang mensupport Amerika Serikat selama Perang Dingin (Sanger, 1995).

Selama Perang Dingin berlangsung Jepang dituntut agar lebih fokus untuk menjaga pertahanannya sendiri, sedangkan di luar Jepang banyak terjadi konflik antar negara yang diakibatkan oleh Perang Dingin. Adanya Pasal 9 membuat SDF memiliki peran yang sangat sempit, hal ini menjadi dilemma bagi Jepang yang ingin ikut andil dalam menciptakan perdamaian Dunia.

Pada tahun 1991 ketika Uni Soviet telah runtuh, secara bersamaan juga menimbulkan konflik di Timur Tengah, dengan melibatkan beberapa negara di Timur Tengah yang menyita banyak perhatian dari seluruh negara di dunia termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Konflik bersenjata yang terjadi di Timur Tengah pada Tahun 1991 yang dikenal sebagai Perang Teluk (*Gulf War*) melibatkan Negara Irak dan Kuwait yang terlibat sengketa lahan minyak di Rumaila. Puncaknya ketika Presiden Irak memerintahkan untuk menginvasi Kuwait dengan mengirimkan 100.000 pasukan militer dan 300 Tank, yang bertujuan untuk mendapatkan cadangan minyak yang besar. Hal ini kemudian mendorong Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 678, dimana setiap negara-negara anggota PBB diizinkan menggunakan “semua sarana yang diperlukan” untuk memukul mundur Iraq dari Kuwait. Pada tanggal 17 Januari 1991 terbentuklah koalisi multinasional terbesar sepanjang sejarah pasca Perang Dunia II, yakni sekitar 670.000 tentara gabungan terbentuk yang dipimpin oleh Amerika Serikat dibawah komando Jendral Norman Schwarzkopf untuk mengusir Iraq dari Kuwait. Sebanyak 30 negara ikut berkontribusi dalam koalisi multinasional tersebut, termasuk juga Jepang. Dalam kasus ini, peran Jepang untuk mensupport Amerika Serikat dalam menjalankan misi Perdamaian di bawah PBB dinilai cukup menonjol. Jepang ingin terlibat dalam Perang Teluk tahun 1991 dengan meningkatkan peran SDF untuk mensupport Amerika Serikat melalui program *human contribution* dengan mengirimkan pasukan SDF ke Kuwait sebagai pasukan non combatan. Namun hal tersebut terhalang oleh Pasal 9 Konstitusi dan kesepakatan NDPG yang dilakukan dengan Amerika Serikat, sehingga sebagai gantinya Jepang memberikan bantuan berupa uang dana sebesar \$13 milyar untuk mendukung pasukan koalisi. Dana tersebut sangatlah besar dan sangat membantu pasukan koalisi secara signifikan, memberikan dana sebesar itu dapat dilakukan oleh Jepang mengingat Jepang sangat fokus membangun kembali

perekonomiannya semenjak adanya Pasal 9 Konstitusi. Meskipun menuai banyak kecaman dari dunia internasional karena tindakan Jepang tidak sesuai dengan Pasal 9 Konstitusi, namun hal tersebut disadari oleh Amerika Serikat sebagai potensi besar yang dimiliki Jepang dalam mendukung kekuatan militer Amerika Serikat. Sehingga pada tahun 1995, Amerika Serikat dan Jepang meninjau kembali NDPG tahun 1978, dan menyepakati NDPG baru untuk meningkatkan peran SDF. Sehingga terbentuklah *Japan-US Defense Guidelines 1997*, yang membuat ruang lingkup kerja sama antara Amerika Serikat dan Jepang lebih luas (Przystup, 2015).

## 2. Jepang dapat lebih berperan aktif dan ikut berpartisipasi memerangi Terorisme

Pasca diperbaharui nya *Japan-US Defense Guidelines 1997*, aliansi Amerika Serikat dan Jepang kembali dihadapkan dengan suatu permasalahan yang melanggar ketentuan Japan-US Guideline sekaligus menyimpang dari pasal 9 konstitusi Jepang. Pada Februari 2004, Jepang membuat kebijakan “Special Law for Iraq Reconstruction” dimana Jepang mengirimkan sejumlah 1000 pasukan SDF untuk terlibat dalam rekonstruksi Irak. Pengiriman pasukan SDF ke Luar Negeri merupakan yang pertama semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Pasukan SDF yang dikirim Jepang ke Irak merupakan pasukan *non-combatant* yang bertugas untuk memberikan “*support*” atau bantuan yang dibutuhkan oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutu seperti air, tenaga medis, pembangunan infrastruktur di zona perang, dsb. Tidak sampai disitu, dalam misi rekonstruksi di negara Irak, Jepang tidak hanya memberikan bantuan berupa fisik namun juga menggelontorkan dana sebesar \$5 milyar. Tindakan Jepang ini sebagai wujud dalam mendukung Amerika Serikat untuk memerangi terorisme (Mutiarahati, 2017). Pada perang di Afghanistan, Amerika Serikat meminta Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam pasukan militer multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di Afghanistan kapal-kapal Jepang yang beroperasi di Samudera Hindia, memberikan bahan bakar dan bantuan logistik lainnya bagi pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat (Despuriansyah, 2015).

Amerika Menyadari bahwa potensi yang dimiliki oleh Jepang sangat berguna untuk membantu memperkuat militer Amerika Serikat menjalankan misi Perdamaian di dunia. Hal tersebut juga menjadi perdebatan di kalangan publik mengenai tindakan

yang dilakukan oleh Jepang karena tidak sesuai dengan konstitusi Jepang. Sehingga karena hal tersebut Shinzo Abe menginginkan adanya Amandemen Pasal 9 dan Amerika Serikat menyetujui usulan Jepang untuk merevisi *Japan-US Defense Guidelines tahun 1997* yang bertujuan untuk meningkatkan peran SDF serta memperkuat aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang. Di sahkannya RUU baru Jepang yang merevisi Pasal 9 Konstitusi Jepang, membuat Jepang dengan lebih leluasa mengirimkan militernya ke Luar Negeri. Dapat menyertakan SDF dalam kerjasama kolektif sehingga dapat membantu dan membela aliansinya ketika menghadapi serangan.

### 3. Amerika Serikat Mendapatkan Keuntungan Dalam Segi Ekonomi Dalam Upaya Jepang Meningkatkan Kemampuan Militernya

Sejalan dengan meningkatnya Peran SDF, Jepang juga secara bertahap membangun militernya dan terus menaikkan anggaran militernya untuk memperkuat hubungan kerjasama dibidang keamanan dan perdamaian dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat semenjak tahun 2012 hingga 2016 anggaran militer Jepang terus meningkat, pada tahun 2012 anggaran militer Jepang sebesar Y4,713.8 billion, tahun 2013 Y4,753.8 billion, kemudian meningkat sebanyak Y4,884.8 pada tahun 2014, dan terus meningkat pada tahun 2015 dan 2016 dengan masing-masing meningkat sejumlah Y4,980.1 billion dan Y5,054.1 billion. hal ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan militer demi menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan asia bersama Amerika Serikat (Ministry of Defense, 2018). Jepang juga telah memperkenalkan persenjataan modern, yang sebagian besar dibeli dari Amerika Serikat dengan menggunakan dana anggaran pertahanan tahunan sebesar 5 triliun yen. Hal tersebut juga menguntungkan Amerika Serikat dari segi Ekonomi, dimana penjualan persenjataan Amerika Serikat terus meningkat (Reynolds, 2019). Seperti diketahui Jepang merupakan salah satu konsumen senjata terbesar Amerika Serikat pada tahun 2018.

Hal ini menjadi sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat dimana dengan mandirinya pasukan SDF serta peran yang lebih aktif, akan meringankan tugas Amerika Serikat sebagai penjaga keamanan Jepang sejak tahun 1947 dan sekaligus dapat menambah kekuatan militer Amerika Serikat dalam menjalankan misi

Perdamaian di dunia. Dan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata militer kepada Jepang.

#### **E. Kewaspadaan Amerika Serikat Terhadap Perkembangan Nuklir dan Rudal Korea Utara, Serta Modernisasi Militer Cina**

Konteks International merupakan situasi politik maupun situasi situasi lain yang terjadi di luar negeri yang dapat mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri suatu negara. Faktor inilah yang membuat Amerika Serikat mendukung adanya reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang. Adanya perubahan sistem Internasional membuat Amerika Serikat harus mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Salah satu faktor tersebut adalah dinamika dan ancaman keamanan di kawasan Asia Timur, seperti ancaman perkembangan nuklir dan rudal Korea Utara serta modernisasi militer yang dilakukan oleh China. (Schoff & Takahashi, 2018)

##### **a. Perkembangan Nuklir dan Rudal Korea Utara**

Perkembangan senjata nuklir dan rudal jarak jauh yang dimiliki oleh Korea Utara menjadi ancaman bersama bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam kunjungan ke Parlemen Australia, Obama mengatakan bahwa *“the transfer of nuclear materials or material by north korea to states or non-state entities would be considered a grave threat to the united states and our allies, and would hold North Korea fully accountable for the cosequences of such action.”*

Sejak berakhirnya Perang Dingin, Korea Utara menjadi konsentrasi bagi Jepang dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut berbagi pendekatan strategis terhadap Korea Utara dan mencari solusi diplomatik untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara. Berikut potensi ancaman yang dimiliki Korea Utara yang dapat mengganggu kestabilan kawasan (Schoff & Takahashi, 2018) :

1. Kemampuan serangan menengah dan jarak jauh Korea Utara yang terus meningkat. Meningkatnya kemampuan militer Korea Utara seperti meningkatnya kecanggihan senjata nuklir, kendaraan dengan pengiriman jarak jauh, peluncuran rudal jarak jauh melalui kapal selam dibawah laut dan

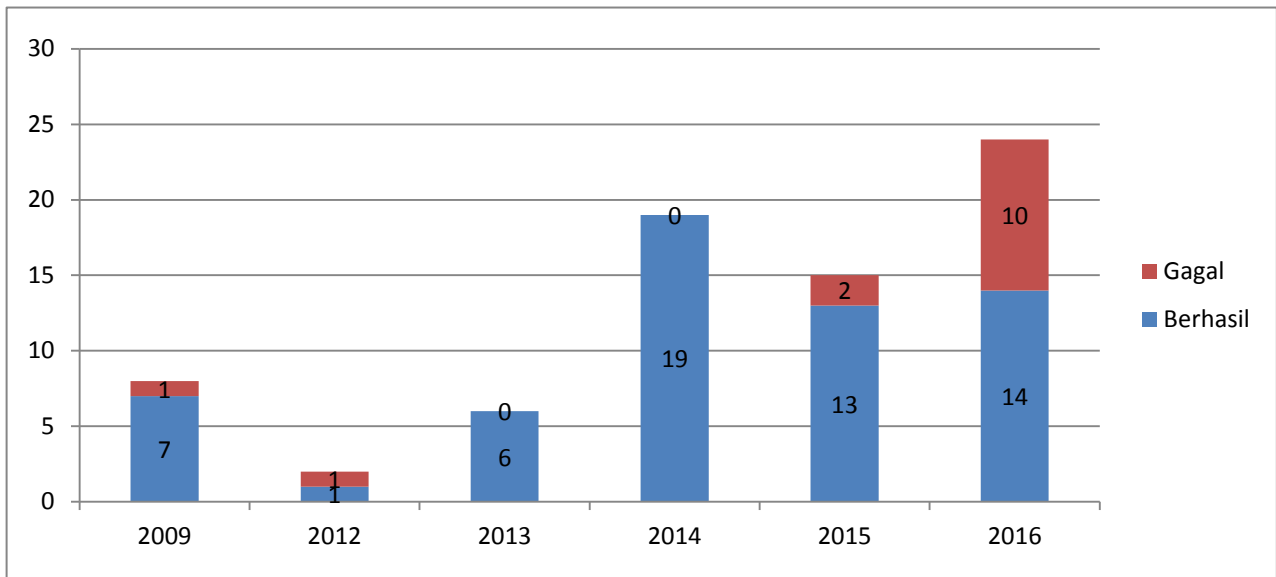


kemampuan serangan saturasi pada jarak menengah, berarti merupakan ancaman bagi kota-kota di Jepang yang berada dalam jangkauan rudal-rudal Korea Utara. Upaya intimidasi yang sering dilakukan oleh Pyongyang sangat mengancam keamanan wilayah Jepang, seperti dilakukannya berbagai uji coba rudal jarak jauh melintasi wilayah perairan Jepang. Korea Utara juga akan dapat menyerang pangkalan militer A.S. di Jepang dan wilayah yang lebih luas dengan nuklir, kimia, biologi, atau hulu ledak konvensional besar yang dapat secara signifikan menghambat operasi A.S. secara langsung atau tidak langsung (Melalui tekanan politik lokal).

2. Korea Utara tidak merasa terikat dan tidak memiliki kepentingan dalam stabilitas global, memiliki insentif untuk berkembang. Kampanye yang terus digencarkan oleh dunia internasional untuk memberikan tekanan dan sanksi terhadap Korea Utara, hal ini bertujuan mengurangi akses Korea Utara terhadap jaringan perdagangan dan keuangan agar Korea Utara kehilangan sumber kekuatannya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melemahkan rezim dan mendorong Pyongyang untuk mempertimbangkan negosiasi tentang penghentian program nuklir dan misilnya. Namun alih-alih ingin memutus sumber dana Korea Utara, hal tersebut juga bisa memberi insentif terhadap Pyongyang. Dengan adanya tekanan terus menerus dari seluruh dunia dan diberikannya berbagai macam sanksi atau embargo terhadap Korea Utara, akan memicu tindakan yang lebih ekstrim lagi dari Korea Utara dimana Pyongyang akan menggunakan jaringan terlarangnya untuk menjual teknologi atau komponen senjata nuklir mereka kepada kelompok luar untuk mendapatkan keuntungan dan menebar ancaman serta gangguan global.
3. Kecurigaan serta saling tidak percaya antara satu sama lain dan komunikasi yang buruk dapat meningkatkan peluang terjadinya konflik. Korea Selatan semakin berani dalam menggunakan teknologi serta peralatan militernya untuk menakuti lawannya. Akan tetapi hal tersebut terjadi akibat banyaknya tekanan yang diterima oleh Korea Selatan dari Amerika Serikat dan

sekutunya yang membuat Korea Selatan merasa bertambah lemah, dan dapat mendorong Pyongyang untuk meluncurkan berbagai macam rudalnya di awal konflik tingkat rendah. (Schoff & Takahashi, 2018)

Ancaman Korea Utara semakin nyata ketika Korea Utara terus menerus melakukan uji coba nuklirnya setiap tahun. pada tahun 2009 International Ballistic Missile (ICBM) milik Korea Utara diluncurkan tepat diatas kepulauan Jepang, hal tersebut dilakukan oleh Korea Utara untuk mengintimidasi Jepang dan menantang Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang. Meskipun uji coba senjata tersebut sempat menurun hingga tahun 2012, namun uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara kembali meningkat drastis. Hal ini tentunya akan mengancam kestabilan kawasan di Asia Timur. Berikut data Jumlah uji coba Nuklir Korea Utara dari tahun 2009-2016 yang disajikan pada grafik 1. (Pitriyadi, 2019, pp. 309-322) ;



Grafik 1.1 Jumlah Uji Coba Nuklir Korea Utara

Dengan adanya ancaman nuklir serta perilaku yang sangat agresif dari Korea Utara, membuat kestabilan dan keamanan kawasan menjadi tertanggu. Hal tersebut dapat menimbulkan *security dilemma* bagi negara-negara tetangga di sekitar Korea Utara, seperti Korea Selatan dan Jepang serta Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari kedua negara tersebut. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap

perkembangan Nuklir Korea Utara sangatlah beralasan. Ancaman yang diberikan oleh Korea Utara tidak hanya sebatas ancaman militer, namun juga dapat menyebabkan berbagai masalah diberbagai sektor, salah satunya akan sangat mengganggu aktifitas ekonomi Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik.

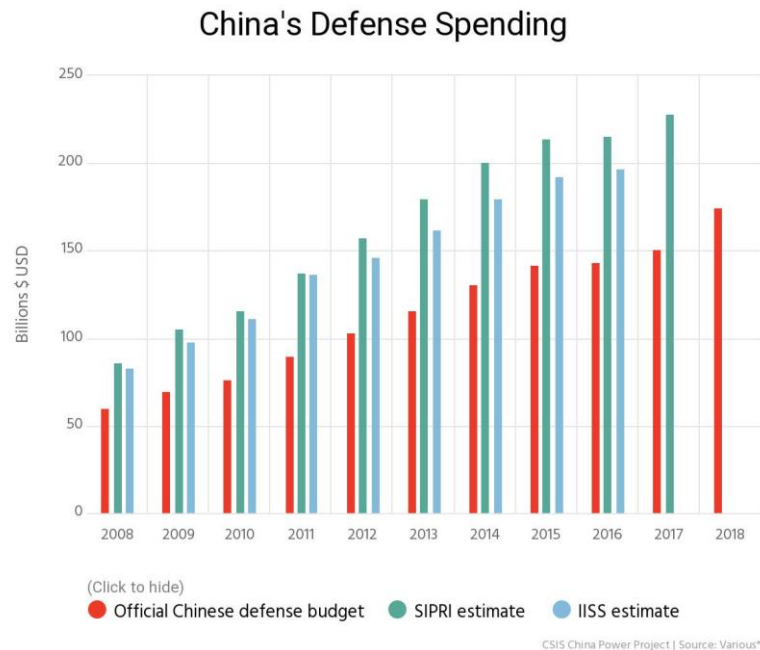
#### **b. Modernisasi dan Perkembangan Militer China**

Ancamannya lainnya yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional Amerika Serikat datang dari Cina. Tidak hanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Cina juga memiliki perkembangan militer yang cukup pesat dan hal tersebut sangat berdampak terhadap situasi politik maupun keamanan di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut ditunjukkan dengan sifat agresif Cina terhadap konflik di Laut China Selatan, dimana Cina bersinggungan dengan berbagai negara di Asia Tenggara terkait klaim wilayah Laut China Selatan yang dilakukan oleh Tiongkok. Dan juga kasus ADIZ yang menimbulkan konflik antara Cina dan Jepang. Tidak hanya itu sifat agresif Cina juga terlihat dari adanya peningkatan anggaran belanja militer yang signifikan yang dilakukan oleh Cina dalam kurun waktu dari tahun 2010 hingga 2015 (Putri, 2018).

Pada tahun 2010 total belanja pertahanan Cina sebanyak \$138 billions USD, sedangkan pada tahun 2011 total belanja pertahanan Cina sebesar \$149 billions USD. Dan peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2012 dengan total belanja sebesar \$161,8 billions USD. Dan terus meningkat pada tahun 2013 hingga 2015, yang masing-masing berjumlah \$176,9 billions USD pada tahun 2013, \$191,9 billions USD pada tahun 2014 dan \$204,5 billions USD di tahun 2015 (China Power Team, 2015). Dan anggaran pertahanan Tiongkok tersebut meningkat dua kali lipat selama delapan tahun terakhir menjadi sebesar \$226 billions USD pada tahun 2016. Pada tahun 2010 China merupakan negara yang memiliki anggaran militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat dan terus menempel Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat mendukung modernisasi militer Tiongkok dan meningkatkan kecanggihan pertahanan Tiongkok seperti rudal jelajah, pesawat siluman dan kapal induk, dan memperkuat pasukan

ekspedisi maritim dan udara yang dapat memperkuat pengaruh Cina di kawasan Laut Cina Selatan. (Schoff & Takahashi, 2018)

Berikut peningkatan anggaran militer Cina dari berbagai lembaga survei dari tahun 2008-2015 (China Power Team, 2015) dapat dilihat pada grafik 4.2 :



**Grafik 2.2 Peningkatan Anggaran Militer China**

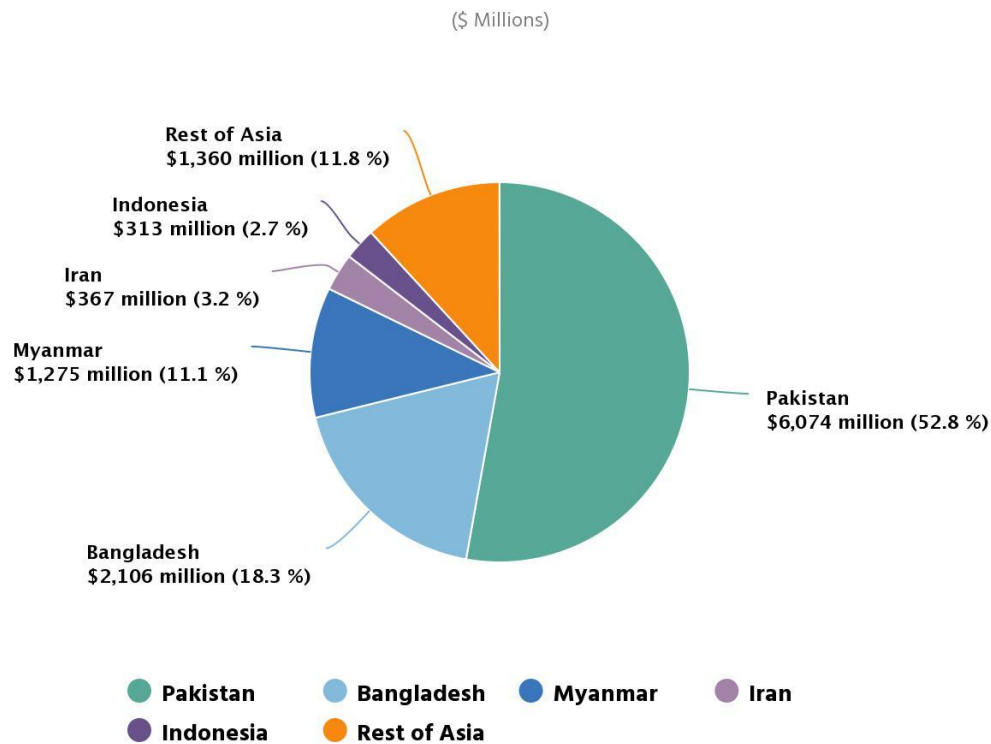
Disamping anggaran militer yang terus meningkat dari tahun ke tahun, China juga merupakan negara yang memiliki jumlah personel militer terbanyak di kawasan Asia. Diketahui bahwa jumlah total keseluruhan personel militer yang dimiliki oleh China sebanyak 2.233.000 orang. Yang terdiri dari 1,6 juta personel angkatan darat, sebanyak 235 ribu personel angkatan laut, dan sejumlah 398 ribu personel angkatan udara. Jumlah personel militer tersebut unggul sangat jauh dari negara-negara tetangga disekeliling China, seperti Jepang dan Korea Utara yang masing masing memiliki total keseluruhan personel sebanyak 243.650 dan 1.210.000. (Putri, 2018)

Tidak hanya melakukan peningkatan kekuatan dalam sektor militer, Cina juga dapat mengekspor teknologi militer mereka ke berbagai negara baik disekitar Cina hingga ke negara-negara di luar benua Asia Seperti Benua Afrika dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade ditambah dengan modernisasi militernya yang terus-menerus telah memungkinkan Cina untuk muncul sebagai pemain utama dalam perdagangan senjata global. Selama bertahun-tahun, Beijing mengimpor beberapa kali lebih banyak senjata konvensional daripada yang dijual di luar negeri, tetapi sejak 2013 nilai ekspor senjata China telah melampaui nilai akuisisi asingnya. Antara 2008 dan 2017, China mengekspor sekitar \$14,4 miliar senjata konvensional di seluruh dunia, menjadikannya pemasok senjata ke-5 terbesar didunia, dibelakang Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Jerman (China Power Team, 2015).

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), penjualan senjata konvensional China melonjak dari \$ 650 juta pada 2008 menjadi \$ 1,13 miliar pada 2017. Bagian terbesar ekspor ini, sekitar 74 persen, pergi ke Asia. Tambahan 21 persen mengalir ke Afrika. Meskipun Cina telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin ekspor senjata, nilai keseluruhan dari perdagangannya masih sangat kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang ekspornya rata-rata \$ 9 miliar per tahun selama sepuluh tahun terakhir. Namun hal tersebut cukup untuk membuat Amerika Serikat yakin jika kekuatan Cina tidak dapat diremehkan.

Berikut data tabel hasil Ekspor senjata militer Cina ke berbagai benua didunia dari tahun 2008-2017 (China Power Tim, 2018) :

## Chinese Arms Exports to Asia, 2008-2017



CSIS China Power Project | Source: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

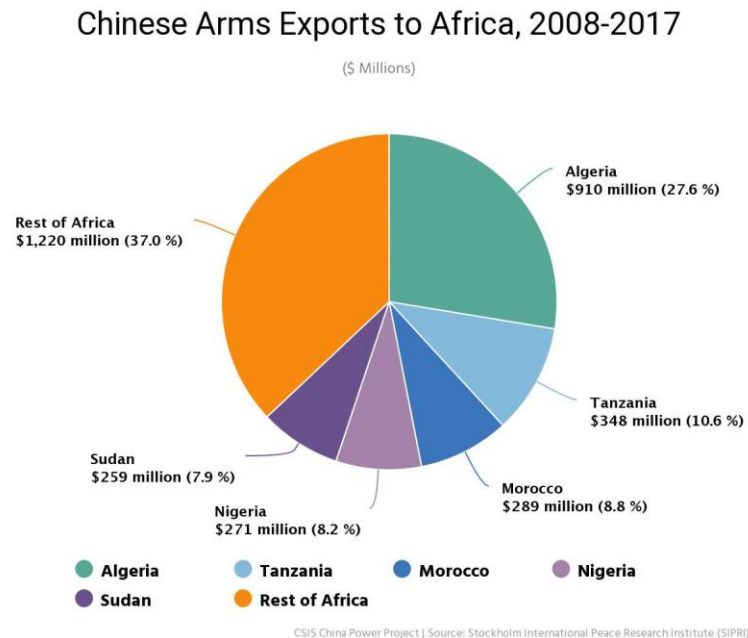
**Grafik 3.3 Ekspor Persenjataan China di Kawasan Asia tahun 2008-2017**

Bangladesh juga merupakan pembeli kuat senjata Cina. Antara 2008 dan 2017, China memberikan \$ 1,86 miliar senjata ke Bangladesh. Ini merupakan 71,9 persen dari akuisisi militer Bangladesh selama periode ini, menjadikan Cina sebagai pemasok senjata terbesar ke Dhaka. Cina mendukung pengadaan ini dengan menawarkan pinjaman murah hati dan menyediakan barang dagangannya dengan harga bersaing. Diskon akuisisi termasuk transfer 2013 dari dua kapal selam tipe-035G Ming bekas pakai untuk Bangladesh masing-masing dengan harga lebih dari \$ 100 juta. Sejak 2006, Cina juga memasok mayoritas senjata ringan kepada

Bangladesh, dengan total lebih dari 16.000 senapan dan 4.100 pistol (China Power Tim, 2018).

Myanmar adalah pasar terbesar ketiga untuk ekspor senjata Cina di Asia. Sejak pelonggaran sanksi terhadap Myanmar pada awal 2010-an, negara itu telah meningkatkan akuisisi senjata asing. Kegembiraan membeli ini telah memungkinkan Cina untuk membuat terobosan besar. Selama enam tahun terakhir, Myanmar telah mengimpor \$ 954 juta senjata konvensional dari Tiongkok. Item tiket yang lebih tinggi termasuk 17 pesawat JF-17, 12 UAV Pelangi Cina, 2 Frigat Tipe-43, dan 76 kendaraan lapis baja Tipe-92 (China Power Tim, 2018).

China juga mengekspor senjata militernya ke berbagai Negara di benua Afrika seperti Aljazair, Maroko, Sudan, Nigeria dan Negara benua Afrika lainnya (China Power Tim, 2018). Seperti yang terlihat pada Grafik 4.4 :



**Grafik 4.4 Ekspor Persenjataan China di Kawasan Afrika tahun 2008-2017**

China secara aktif berupaya memperkuat pijakannya di pasar tertentu, seperti Aljazair. Ekspor Tiongkok ke negara Afrika Utara mencapai \$ 483 juta antara tahun 2008 dan 2014, tetapi melonjak menjadi \$ 247 juta pada tahun 2015 saja dan memuncak pada \$ 499 juta pada tahun 2016 karena beberapa pesanan senjata dipenuhi. Pengadaan ini mencakup tiga fregat C-28A, yang dipesan oleh Aljazair pada 2012 (China Power Tim, 2018).



Tidak hanya sebatas di benua tetangga saja, penjualan senjata militer China juga telah mencapai ke Benua Amerika. Senjata yang canggih dengan harga yang murah menjadi sangat populer dikalangan Negara-negara Amerika Latin. Berikut data Negara-negara benua Amerika yang mengimpor senjata dari China (China Power Tim, 2018), terlihat pada tabel 4.1

Overall Rank	Country	Value (Million \$)	% of Total
1	Venezuela	592	87
2	Bolivia	45	7
3	Trinidad and Tobago	16	2
4	Peru	15	2
5	Ecuador	8	1

**Tabel 1.1 Top 5 Chinese Arms Export Destinations in the Americas 2008-2017**

Ekspor senjata China di Amerika terkonsentrasi di Venezuela, yang menarik 87,4 persen dari penjualan senjata regional Beijing selama beberapa dekade terakhir. Transfer senjata Tiongkok ke Venezuela tidak dimulai dengan sungguh-sungguh hingga setelah 2006 ketika Amerika Serikat melakukan embargo senjata terhadap Venezuela, karena gagal bekerja sama dalam upaya-upaya anti-terorisme dengan Amerika Serikat. Sehingga sejak saat itu, Caracas telah menemukan mitra yang pas karena telah berupaya meningkatkan militernya dengan cara yang hemat biaya (China Power Tim, 2018).

Transaksi penting termasuk penjualan 18 jet latih K-8 pada 2010, 121 kendaraan lapis baja VN-4 pada 2012, dan sejumlah rudal anti-kapal C-802 yang

tidak diungkapkan pada 2017. Cina sekarang menjadi pemasok senjata konvensional nomor dua Venezuela di 12 persen dari pangsa pasar; posisi yang jauh di belakang peran dominan Rusia sebagai pemasok untuk 74 persen impor senjata Caracas.

Sementara penjualan senjata konvensional utama Tiongkok di wilayah ini terbatas, Cina adalah penyedia senjata ringan ke Amerika Utara. Sebelum 2009, sebagian besar pengadaan ini mengalir ke Kanada, tetapi dalam beberapa tahun terakhir Meksiko telah menjadi pasar yang lebih signifikan. Namun, semua mengatakan, China hanya memasok sebagian kecil dari akuisisi senjata ringan asing kedua negara. Menurut beberapa laporan, senjata Cina semakin menemukan jalan mereka ke tangan kartel Meksiko. (China Power Tim, 2018)

Peningkatan anggaran pertahanan yang sebagian besar dihabiskan untuk belanja militer serta semakin luasnya bisnis ekspor senjata militer yang dimiliki oleh Cina, membuat negara-negara disekitarnya memberikan respon dengan meningkatkan juga pertahanan mereka sebagai bentuk *counter balance* untuk menghadapi peningkatan militer Cina. Akibat adanya fenomena tersebut membuat kestabilan kawasan menjadi terpengaruh, dan mengancam aktifitas lainnya di kawasan tersebut, terutama kegiatan perdagangan Amerika Serikat di sekitar kawasan Asia Pasifik.

Dalam merespon hal tersebut Amerika Serikat mengambil langkah pencegahan untuk menekan kekuatan Cina agar tidak terus berkembang dengan cara memperkuat kerjasama aliansi nya dengan Jepang di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang berokus dibidang keamanan dan pertahanan, hal ini dilakukan sebagai upaya meredam hegemoni Cina yang beberapa dekade ini terlihat sangat dominan di kawasan Asia Pasifik. Presiden Obama mengatakan bahwa “Amerika Serikat bersama seluruh mitra-mitra ekonomi dan keamanannya di kawasan Asia Pasifik telah melakukan berbagai macam strategi untuk menghadapi Cina dalam isu-isu dimana kepentingan saling tumpang tindih (terutama secara ekonomi) dan berupaya mengimbangi peningkatan kapasitas dan pengaruh militer Beijing”. Dalam perkataan obama tersebut, terlihat

bahwa Amerika Serikat akan berusaha melakukan berbagai cara untuk mengimbangi dan meredam laju pertumbuhan kekuatan China. Amerika Serikat ingin terus memperkuat kekuatannya dengan cara melakukan kerjasama dengan negara aliansi dalam bidang ekonomi dan juga keamanan. (Putri, 2018)

## **F. Kesimpulan**

Amerika Serikat dan Jepang telah melakukan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Meskipun saling bermusuhan pada Perang Dunia II, akan tetapi hingga sekarang Amerika Serikat dan Jepang merupakan aliansi yang sangat solid. Lahirnya hubungan antar kedua negara bermula pada saat kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, hingga masuknya pengaruh Amerika Serikat terhadap Jepang, khususnya pengaruh dibidang pertahanan dan keamanan. Kemudian pada tahun 1951, disepakati perjanjian pertama hubungan kerjasama antara AS dan Jepang melalui *San Fransisco Treaty* dan *Japan-US Security Treaty*. Dimana melalui kedua perjanjian tersebut, Jepang secara tidak langsung telah “dilucuti” sebagai konsekuensi bagi kubu yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II.

Dengan dilakukannya sebuah perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, Jepang tidak boleh memiliki kekuatan militer yang bersifat ofensif dan menerapkan sistem pertahanan diri atau *Self Defense*. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan melindungi keamanan wilayah Jepang dari kekuatan luar yang mengancam keamanan Jepang. Hubungan kerjasama tersebut berlangsung sejak tahun 1951 atau sejak disepakatinya perjanjian kerjasama pertama antara Amerika Serikat dan Jepang. Hingga pada tahun 2015, Amerika Serikat untuk pertama kalinya mendukung Jepang untuk memiliki kekuatan militernya sendiri. Melalui reinterpretasi pasal 9, Jepang tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Amerika Serikat dalam hal pertahanan dan keamanan. Jepang akan memperluas peran militernya dalam keikutsertaan menjaga dan menciptakan lingkungan perdamaian di dunia. hal ini tentunya menjadi momen pertama kalinya bagi militer jepang sebagai militer yang proaktif, semenjak menerapkan *self defense* yang membuat militer Jepang menjadi pasif dan hanya bereaksi ketika wilayah Jepang terusik atau mendapatkan serangan dari kekuatan luar. Dengan adanya reinterpretasi pasal 9, Jepang akan dengan lebih leluasa untuk mengirimkan pasukan ke luar negeri untuk menjalankan misi perdamaian.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam mendukung reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang merupakan penguatan dari hubungan aliansi antar kedua negara. Ada 3 faktor yang memengaruhi AS dalam mendukung reinterpretasi pasal 9, yakni Kondisi Politik Dalam Negeri, Kemampuan/Situasi Ekonomi dan Militer, serta Konteks Internasional. Kondisi Politik Dalam Negeri AS pada masa kepemimpinan Presiden Obama berfokus terhadap kebijakan “*pivot to asia*”. Dimana Amerika Serikat menekankan kepentingan nasionalnya yang ingin menjaga jalur perdagangan dikawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat lebih mengedepankan soft diplomacy dan memilih untuk mengimbangi kekuatan China di Kawasan Asia Pasifik.

Dalam hal segi militer, adanya amandemen terhadap pasal 9 konstitusi Jepang akan menguntungkan bagi Amerika Serikat dimana dengan mandirinya pasukan SDF serta peran yang lebih aktif, akan meringankan tugas Amerika Serikat sebagai penjaga keamanan Jepang sejak tahun 1947 dan sekaligus dapat menambah kekuatan militer Amerika Serikat dalam menjalankan misi Perdamaian di dunia. Dan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata militer kepada Jepang.

Dalam Konteks Internasional, pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dipengaruhi akibat adanya fenomena The Rise of China yang dapat mengganggu kestabilan keamanan kawasan di Asia Pasifik. Dimana kekuatan China sangat mencolok dan unggul jauh dari negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia. Sehingga mendorong Amerika Serikat dalam menyetujui reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang, dengan menjadi lebih aktifnya militer Jepang diharapkan akan mampu setidaknya mengimbangi kekuatan China di kawasan Asia Pasifik. Selain ancaman dari China, ancaman lain muncul dari Korea Utara yang terus menebar teror terhadap wilayah Jepang dan sekitarnya. Korea Utara dengan berbagai macam uji coba rudal nuklirnya membuat keamanan di kawasan menjadi tidak stabil. Berkali-kali rudal Korea Utara melewati wilayah udara Jepang dan menjadi ancaman bagi keamanan Jepang. Dengan disepakatinya reinterpretasi pasal 9, akan mempermudah tugas militer AS dalam menjaga wilayah Jepang dari ancaman luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beck, P. A., & Sorauff, F. J. (1992). *Party Politics in America*. HarperCollins.
- China Power Team. (2015, December 28). *What does China really spend on its military?* Retrieved April 22, 2019, from China Power: <https://chinapower.csis.org/military-spending/>
- China Power Tim. (2018, June 29). *How dominant is China in the global arms trade?* Retrieved April 24, 2019, from China Power: <https://chinapower.csis.org/china-global-arms-trade/>
- Coplin, W. D., & Marbun, M. (2003). *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis Edisi Kedua*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Despuriansyah, A. (2015). *Kepentingan Amerika Serikat Dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Jepang Periode 2006-2012*.
- Faisol, W. (2015). *Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014*.
- Jasmine, R. (2013, March 3). *Berpacu Menjadi Yang Terbaik*. Retrieved April 25, 2017, from [http://rosaliajasmine-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-84819-SOH101%20\(Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional\)-Kepentingan%20Nasional.html](http://rosaliajasmine-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84819-SOH101%20(Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional)-Kepentingan%20Nasional.html)
- Lucyana, R. M. (2014, September 30). *Berpacu Menjadi Yang Terbaik*. Retrieved April 25, 2017, from [http://ruth-mery-lucyana-fisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-112329-SOH%20101%20%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Kepentingan%20Nasional%20sebagai%20Esensi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html](http://ruth-mery-lucyana-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-112329-SOH%20101%20%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Kepentingan%20Nasional%20sebagai%20Esensi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html)
- McBride, J., & Chatzky, A. (2019, January 4). *What Is the Trans-Pacific Partnership (TPP)?* Retrieved April 27, 2019, from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/what-trans-pacific-partnership-tpp>
- Ministry of Defense. (2018). *Defense of Japan 2018. Defense of Japan*.
- Mutiarahati, N. S. (2017). *Latar Belakang Jepang Menyetujui Revisi Japan-US Defense Guidelines Tahun 2015*.
- Pitriyadi, N. D. (2019). *Dilema Pemerintah Jepang Dalam Merelokasi Pangkalan Militer Amerika Serikat Di Okinawa. eJournal Ilmu Hubungan internasional*.
- Plano, J. C., & Olton, R. (1969). *The International Relations Dictionary*. Michigan: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Przystup, J. J. (2015). *The U.S.-Japan Alliance: Review of the Guidelines for Defense Cooperation. Strategic Perspectives*.
- Putri, H. E. (2018). *Pasal 9 Konstitusi Jepang : Perubahan Sikap AS Terhadap Militer Jepang. Nation State*.
- Reynolds, I. (2019, June 25). *Everything You Need to Know About the U.S.-Japan Defense Treaty Irking Trump*. Retrieved June 31, 2019, from the Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/business/everything-you-need-to-know-about-the-us-japan->

defense-treaty-irking-trump/2019/06/25/4ddd5a7e-971f-11e9-9a16-dc551ea5a43b\_story.html?noredirect=on&utm\_term=.03382d1ee74a

Sabur, R., Allen, N., Henderson, B., & Graham, C. (2017, November 29). *Donald Trump 'will take care of it' after North Korea fires ballistic missile 'capable of striking anywhere in US'*. Retrieved February 24, 2018, from The Telegraph: [https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/28/north-korea-fires-ballistic-missile-reports-may-have-landed/?utm\\_campaign=Echobox&utm\\_medium=Social&utm\\_source=Facebook](https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/28/north-korea-fires-ballistic-missile-reports-may-have-landed/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook)

Sanger, D. E. (1995). The Nation: Car Wars; The Corrosion at the Core of Pax Pacifica. *The New York Times*.

Satris, R. (2011). Kepentingan Israel Mendukung Gerakan Separatisme Sudan Selatan.

Schoff, J. L., & Takahashi, S. (2018). STRENGTHENING U.S.-JAPAN Alliance Deterrence. *ASIA STRATEGY INITIATIVE*, 3.

Toriq, A. (2015, Desember 17). *Saat Militer Jepang Turun Gunung*. Retrieved November 26, 2017, from detik.com: <https://news.detik.com/internasional/3098001/saat-militer-jepang-turun-gunung>